DAFTAR PUSTAKA

Ahmad S. Ruky. 2002. Sistem manajemen Kinerja. PT Gramedia Pustaka Utama,Jakarta

Arif, Bahtiar, Muchlis dan Iskandar. 2002. Akuntansi Pemerintahan. SalembaEmpat, Jakarta.

Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Penerbit. Erlangga :Jakarta

Dessler, Gary. 1997. Manajemen Sumberdaya Manusia Jakarta. PT.Prenhallindo.

Gorys Keraf. 2007. Komposisi : Sebuah Suatu Keterampilan Berbahasa. Bandung:Penerbit Angkasa

Harun. 2009. Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia.Salemba Empat: Jakarta.

J.B. Ghartey. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat

Khairandy, Ridwan dan Malik, Camelia. 2007. Good Corporate Governance. KreasiTotal Media, Yogyakarta.

LAN & BPKP. 2000. Akuntabilitas dan Good Governance. Jakarta: Lembaga.Administrasi Negara.

Ledvina V. Carino. 2002. Administrative Accountability. San Francisco State.University Fall.

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Miles, M.B & Huberman A.M. 1984, Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh.Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta : Penerbit Universitas IndonesiaMustafa. 2013. Birokrasi Pemerintah. Makasar: Alfabeta

Noah De Lissovoy & Peter Mclaren. 2003. Educational “Accontability” and The Violence of Capital: A Marxiang Reading. Journal of Educational Policy.

Nurkhamid, Muh. 2008. Implementasi Inovasi Sistem Pengukuran Kinerja InstansiPemerintah. Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 3, No. 1

Polidano, Charles. 1998. The New Public Management in Developing Countries.Policy and Management Working Paper No. 13.

Simanjuntak Payaman J. 2005. Manajemen dan Evaluasi Kinerja. Jakarta : FE UISjahruddin Rasul. 2000. Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja, Jakarta

Sunarto. 2003. Perilaku Organisasi. Yogyakarta: AMUS Yogyakarta

Republik Indonesia. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 Tentang GrandDesaign Reformasi Birokrasi 2010-2025

Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah

Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang AkuntabilitasInstansi Pemerintah

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Evaluasi AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024

Wijaya, Citra H Anthonius dan Akbar, Rusdi. 2013. *The Influence of Information, Organizational Objective and Targets, and External Pressure Toward The Adoption of Performance Measurement System in Public Sector*. Journal of Indonesian Economy and Business (Vol.28, Number 1; 62-83)